

FUNGSI *GOVERNMENT PUBLIC RELATIONS* BADAN PENGUSAHAAN BATAM: ANALISIS STUDI KASUS KONFLIK MASYARAKAT REMPANG

Rosmala¹;Desy Mairita², Susi Artuti Erda Dewi³

^{1,3} Prodi Ilmu Komunikasi, STISIP Persada Bunda, Pekanbaru, Indonesia; rosmala.lbs@gmail.com¹,
susiartuti@gmail.com³

² Universitas Muhammadiyah Riau, Pekanbaru, Indonesia; desymairita@umri.ac.id

*Correspondence : rosmala.lbs@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi *government public relation* Badan Pengusahaan (BP) Batam dalam mengatasi konflik yang terjadi pada masyarakat Rempang. Analisis kajian penelitian ini menggunakan data sekunder dengan mengumpulkan data dari artikel, jurnal, *website* BP Batam, berita media *online*. Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa BP Batam melaksanakan fungsi *government public relations* saat mengatasi konflik yang terjadi di Rempang adalah: (1) *Government public relations BP Batam* mengamankan kebijaksanaan pemerintah dengan terwujudnya proyek pengembangan Program Strategis Nasional pembangunan Rempang *Eco City* dari Xinyi Glass Holdings Ltd; (2) Bahwa *Government public Relations* BP Batam memberikan pelayanan, dan pesan atau informasi mengenai kebijaksanaan dan hingga program-program kerja secara nasional kepada masyarakat Rempang; (3) *Government public relations* BP Batam menjadi komunikator dan mediator dalam mengatasi kasus konflik masyarakat Rempang. Melakukan sosialisasi serta menampung aspirasi masyarakat (4) *Government public relations* berupaya menciptakan iklim yang kondusif dan dinamis. Walaupun konflik masyarakat Rempang tidak dapat dihindari, kebijakan yang sudah ditetapkan pemerintah terus berlanjut demi Program pembangunan Nasional jangka pendek atau panjang di Rempang. Melalui *Government public relation* BP Batam telah menyampaikan pada masyarakat yang direlokasi mendapatkan hak-haknya yang diberikan oleh pemerintah.

Kata kunci

Badan Pengusahaan Batam, Government Public Relations, Konflik, Masyarakat Rempang

ABSTRACT

This research aims to analyze the function of government public relations of the Badan Pengusahaan(BP) in overcoming conflicts that occur in the Rempang community. The analysis of this research study uses secondary data from articles, journals, the BP Batam website, and online media news. The results of this research show that BP Batam carried out government public relations functions when dealing with the conflict that occurred in Rempang, namely: (1) Government public relations BP Batam secured government policy by realizing the National Strategic Program development project for the development of Rempang Eco-City from Xinyi Glass Holdings Ltd; (2) That BP Batam Government Public Relations provides services and messages or information regarding policies and national work programs to the Rempang community; (3) Government public relations BP Batam is a communicator and mediator for the Rempang community in Sembulang Hulu, Sembulang Tanjung and Pasir Panjang and is proactive. Carrying out outreach and accommodating community aspirations (4) Government public relations seeks to create a conducive and dynamic climate. Even though the conflict in the Rempang community cannot be avoided, the policies that the government has established

continue to continue for the sake of the short or long-term National Development Program in Rempang. Through government public relations, BP Batam has conveyed to the relocated residents the rights given by the government.

Keywords

Badan Pengusahaan Batam, Government Public Relations, Conflict, Rempang Community

Pendahuluan

Sejak 7 September 2023, terjadi bentrokan di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, antara penduduk dan personel TNI, Polri, dan Direktorat Pengamanan Aset Badan Pengusahaan (BP) Batam. Penyebabnya adalah penolakan untuk membangun Rempang Eco-City. Mayoritas penduduk masih menentang proyek, dan beberapa dari mereka harus dipindahkan. Warga tetap menolak rumah tipe 45 dan luas tanah 500 meter persegi. Mengutip dari CNN Indonesia yang menjadi fakta soal konflik yang terjadi pada masyarakat rempang. Sebagai berikut pertama, Lahan Milik Anak Perusahaan Tomy Winata. Kepala BP Batam Muhammad Rudi mengatakan bahwa PT MEG (Makmur Elok Graha) membeli 2.000 hektare (ha) lahan untuk pembangunan Rempang *Eco City* dari Xinyi Glass Holdings Ltd. Kedua, 3 perkampungan harus direlokasi karena berada di sekitar kawasan pembangunan pabrik dari total 2.000 ha lahan. 3 kampung tersebut adalah Sembulang Hulu, Sembulang Tanjung, dan Pasir Panjang, dengan sekitar 700 KK. Ketiga, beberapa warga sepakat relokasi. Kepala BP Batam Muhammad Rudi mengatakan bahwa 91 penduduk dari tiga kampung yang terkena dampak pembangunan Rempang *Eco City* setuju untuk pindah. Keempat, Orang-orang yang bersedia direlokasi akan diberikan beberapa hak, seperti lahan seluas 500 meter persegi per kepala keluarga yang telah disertifikatkan pemerintah dan rumah tipe 45. Kelima, BP Batam butuh 1,6 Triliun relokasi warga. Untuk merelokasi 700 KK di tiga desa yang terkena dampak pembangunan Rempang. Keenam, Presiden Joko Widodo minta proyek jalan terus. di tengah perjuangan warga Rempang, meminta agar Rempang *Eco Park* tetap menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN). Ketujuh, Banyak pihak asing tidak senang batam maju (Rachman, 2023)

Menurut Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), setidaknya ada tiga faktor yang memengaruhi keadaan saat ini di Rempang. Pertama, pemerintah Batam, seperti pejabat daerahnya dan BP Batam, tidak banyak bersosialisasi. Kedua, ada enam perusahaan yang diizinkan di wilayah itu. Namun, setelah izin diusut, ditemukan ada kekeliruan dalam prosedur, dan izin itu dicabut, dan hingga saat ini tidak diketahui alasan di baliknya. Ketiga, Bahlil berpendapat bahwa perlu diakui bahwa ada pihak asing yang terlibat dalam masalah Rempang. Hal ini dinilai jika Indonesia mampu mengelola ekonominya dengan baik hingga cepat menjadi negara maju dengan hilirisasi, tidak semua negara suka untuk hal tersebut (Deny, 2023). Meskipun peristiwa yang terjadi di Rempang ini bukanlah yang pertama di Indonesia, itu sudah terjadi beberapa kali. Pengusuran memaksa penduduk yang terkena dampaknya untuk meninggalkan rumah mereka, terkadang tanpa solusi yang jelas. Karena mereka tidak memiliki sertifikat tanah, penduduk Rempang dianggap sebagai warga liar. Oleh karena itu, tidak ada kejelasan tentang ganti rugi, tempat tinggal baru, dan tempat relokasi dalam kasus Rempang (F. Maulana, 2023).

Berdasarkan situs BP Batam, proyek ini akan memakan 7.572 hektare lahan Pulau Rempang atau 45,89 persen dari keseluruhan lahan pulau Rempang yang memiliki luas sebesar 16.500 hektare. Bentrokan kembali terjadi antara penduduk yang menentang proyek dan aparat gabungan. Di depan kantor BP Batam, massa berunjuk rasa. Selain itu,

mereka menuntut tujuh warga yang sebelumnya ditangkap tetapi kemudian dibebaskan sebagai tersangka. Berdasarkan data CNBC Indonesia, yang memberitakan terkiat kasus konflik yang terjadi di Reampang dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 1: Bentrokan warga Rempang dengan TNI,Polri, dan Direktorat Pengamanan Aset BP Batam



Sumber: CNBC Indonesia

Data pada gambar 1 diatas, merupakan akibat bentrokan yang terjadi dengan TNI, Polri dan Direktorat Pengamanan Aset BP Batam dengan masyarakat rempang sehingga ada kesenjangan yang dirasakan oleh masyarakat rempang. BP Batam dalam hal ini harus membrikan pelayan publik dan informasi yang jelas akepada masyarakat menjalankan peran dan fungsinya. Melihat bentrokan yang terjadi maka memunculkan pertanyaan bagi peneliti untuk menalisis kasus konflik yang terjadi bagaiman fungsi humas pemerintah BP Batam dalam mengatasi konflik yang terjadi dengan masyarakat Rempang, solusi apa sajakah yang dihadirkan BP Batam pada warga Rempang dalam konflik yang terjadi.

Government public relations adalah salah satu cabang dalam *Public relations* yang memfokuskan dalam menjalin hubungan antara perusahaan dengan pihak pemerintah negara. Dalam defenisi Grunig & Hunt(1984) bahwa *public relations* adalah manajemen komunikasi maka hal ini menimbulkan tantangan bagi humas untuk mebnagun dan mengembangkan sistem tata kelola informais publik secra baik dengan menerapkan standar standar penyebarluasan infromasi sesuai profesinya(Budhirianto & Sunarsi, 2017). Karena perusahaan tidak lepas dari kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Oleh karena itu, *Government public relations* sangat dibutuhkan untuk memudahkan perusahaan dalam membuat keputusan sesuai kebijakan pemerintah, sehingga perusahaan tidak melanggar hukum. Hubungan yang baik dengan pemerintah juga dapat mempermudah perusahaan ketika perusahaan sedang memiliki masalah. Dalam *public relations*, pemerintah terbilang penting bukan hanya karena membuat peraturan atau hukum saja, selain itu pemerintah juga terdapat orang-orang yang memiliki pengaruh yang sangat besar bagi masyarakat dalam kegiatan bisnis.

Dalam teori Excellence juga dikemukakan Kent & Taylor(2007), *public relations* adalah fungsi strategis manajemen (*invoment*); bagian koalisi dominan dan langsung berkomunikasi dengan top management(*empowerment*); terintegrasi ke dalam satu departement sendiri(*integration*); fungsi manaejmen yang terpisah dari fungsi manajemen yang lain(*independence*); harus melaksanakan fungsi manajer komunikasi

bukan hanya teknisi komunikasi(managerial); bersifat simetris dua arah dala menjalin relasi publik(*simetrical model*); sistem komunikasi internal bersifat siemtris dua arah (*symetrical internal communication*); adanya diversitas peran dalam menjalankan fungsi (*role divercity*); dan humas menutamakan kode etik dan integritas profesi(*ethical public relations*)(Kriyantono, 2017)

Seorang Humas Pemerintah, juga dikenal sebagai *Government Public Relations* (GPR), adalah salah satu pihak yang memainkan peran penting dalam mengatur informasi publik dan menerapkan keterbukaan informasi publik. *Government public relations* bertanggung jawab untuk berkomunikasi secara internal dan eksternal, memberikan informasi kepada masyarakat dan pemerintah dengan tujuan meningkatkan kinerja pemerintah. Adapun *ugas government public relations* menurut susanto dalam (Anggrahini et al., 2008) yaitu (1) tugas strategi humas adalah ikut serta dalam *decision making process*; (2) tugas taktis yaitu memberikan infromasi timbal balik, membuat citra baik . tugas taktis secara baik, maka tugas strategis perlu dimiliki oleh *public relations* , mengingat *public relations* memfunyai fungsi sebagai juru bicara dan koordinator lalu lintas informasi masyarakat. *Public relations* selalu dapat mengetahui latar belakang dari kebijaksanaan dan keputusan yang diambil. Menurut Lattimore dalam (Lubis, 2012) Fungsi paling dasar public relations dalam pemerintahan adalah membantu menjabarkan dan mencapai tujuan progrma pemerintahan, meningkatkan sikap responsif pemerintah, serta meberi publik infromasi yang cukup untuk melakukan penegtahuan diri sendiri. Tujuan dari GPR adalah untuk mengelola informasi dan komunikasi yang berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman dan dukungan publik terhadap Program dan Kebijakan Pemerataan. Program Kerja *government public relations*: (1) Pemerintah sebagai penentu agenda (*agenda setting*) isu-isu di masyarakat untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah sebagai sumber informasi yang akurat dan dapat dipercaya; (2) Membentuk lembaga jejaring komunikasi; (3) Menyusun dan memantau implementasi regulasi tentang GPR oleh K/L/D; (4) Menyediakan dan menyebarkan konten informasi publik ke seluruh Indonesia. (Koinfo, 2023)

Menurut Ruslan dalam (Aras, 2014) fungsi pokok Humas pemerintahan Indonesia pada dasarnya, antara lain: (1) Mengamankan kebijaksanaan pemerintah. (2) Memberikan pelayanan, dan pesan atau informasi mengenai kebijaksanaan dan hingga program-program kerja secara nasional kepada masyarakat. (3) Menjadi komunikator dan sekaligus sebagai mediator yang proaktif dalam menjembati kepentingan instansi pemerintah di satu pihak, dan menampung aspirasi, serta memperhatikan keinginan-keinginan publiknya di lain pihak. (4) Berperan serta dalam menciptakan iklim yang yang kondusif dan dinamis demi mengamankan stabilitas dan keamanan politik pembangunan nasional, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Tujuan dari *Government Relations* menurut Rhenald Kasali adalah: Meningkatkan komunikasi dengan pejabat pemerintah dan lembaga tinggi negara; Memantau lembaga pembuat keputusan dan peraturan pada area yang mempengaruhi bidang usaha mereka.; Mendorong partisipasi pemilih (rakyat) pada setiap lapisan pemerintahan ; Mempengaruhi undang-undang yang berdampak pada ekonomi rakyat dan pelaksanaannya; Meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pembuat keputusan.

Sejumlah riset terdahulu dalam penelitian tentang government public relations misalnya penelitian tentang peran dan fungsi *government public relations* (Fahri & Unde, 2018);(Devi et al., 2016);(Bakti & Zubair, 2021);(Astuty et al., 2017)dengan fokus kajian

peran humas pemerintah sebagai fasilitator komunikasi. Penelitian lain yang lebih spesifik dilakukan oleh (Widiargun et al., 2023); (P. S. Maulana & Afifi, 2021) Penelitian yang membahas tentang peran *public relations* dalam menghadapi isu dan krisis di perusahaan dikaji oleh (Arofi, 2018) melakukan riset yang berhubungan dengan strategi *government public relation*. (Nugraha et al., 2022) risetnya pada analisis strategi *government public relations*. Sejalan dengan peneltinsa yang dilakukan oleh (Furqon et al., 2024) bahwa Peran humas pemerintah kota batam dalam menangani masalah di kepulauan Rempang ini menjadi tugas penting untuk menyelesaikan kasus pembangunan Rempang *Eco City*. Maka Masalah yang terjadi di Pulau Rempang akan menimbulkan citra buruk bagi pemerintah kota Batam. Oleh karena itu peran humas pemerintah kota batam sangat dibutuhkan untuk mempertahankan citra baik pemerintah kota Batam dan menetralsir problematika yang terjadi di masyarakat pulau Rempang. Berdasarkan data permasalahan diatas dan beberapa riset terdahulu maka penelitian sangat relevan untuk dikaji dan memiliki *novelty reseach* pada fungsi *government public relations* BP Batam. Maka tujuan penelitian ini adalah bagaimana fungsi *Government public relation* BP Batam: Analisis studi kasus konflik masyarakat Rempang.

Metode

Menurut Denzin & Lincoln (1994) dalam (Fadli, 2021) penelitian kualitatif merupakan penelitian menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan sebuah fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan yang melibatkan berbagai metode yang ada. Metode dalam penulisan ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomenayang terjadi (Anggito & Setiawan, 2018). Metode Kualitatif dengan data sekunder melalui studi literatur dari jurnal, surat kabar, media *online*, website Humas BP Batambuku yang relevan berkaitan dengan penelitian yang diambil. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara, observasi, dokumentasi dengan cara ini maka peneliti mampu memperoleh data secara valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Moleong, 2016) Teknis analisis yang peneliti gunakan antara lain : (1) Peneliti mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah penelitian yaitu data *reductions*; (2) Peneliti melakukan peninjauan data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, sejenisnya artinya teks yang bersifat naratif yaitu data *display*; (3) *Verification* data, artinya peneliti melakukan penarikan kesimpulan data dengan menemukan makna baru terkait penelitian yang dilaksanakan (Sugiyono, 2015). *Flow analysis* model digunakan sebagai teknik analisis data dalam penelitian ini, yakni terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: 1) Reduksi data; 2) Penyajian data; dan 3) Penarikan kesimpulan. Hal ini seperti yang dijelaskan (Miles et al., 2014) Metode penelitian berisi jenis penelitian, subjek atau objek penelitian, teknik pengumpulan, analisis data, dan keabsahan data.

Hasil dan Pembahasan

Government Public Relations menjalankan salah satu fungsi pokoknya yakni dengan menyebarkan informasi mengenai kebijakan dan program Pemerintah melalui menjaga aliran informasi yang efektif. Upaya tersebut, membuat lembaga pemerintah dapat mengkomunikasikan informasi mengenai kebijakan dengan baik sehingga dapat diterima oleh masyarakat pada akhirnya masyarakat akan mendukung berbagai kebijakan dan program yang dibuat oleh Pemerintah (Prastowo, 2020). Untuk menjawab

tujuan dalam penelitian ini maka berikut adalah hasil penelitian yang penulis analisis pada studi kasus masyarakat Rempang maka fungsi *Government public relations* BP Batam adalah:

Mengamankan Kebijakan Pemerintah

Komitmen pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Investasi RI menegaskan bahwa proyek pengembangan Rempang yang masuk dalam daftar Program Strategis Nasional tersebut harus segera terealisasi. Dalam hal karena direalisasikannya program tersebut masyarakat Rempang mulai bertindak sehingga tercipta konflik antara masyarakat Rempang dengan pemerintah Batam, melalui ini humas BP Batam mengamankan kebijakan pemerintah. Dalam *Practice of Government Public Relations* (Lee et al., 2012) dijelaskan bahwa memberikan pelayanan publik merupakan hal yang paling penting dan diperlukan oleh humas pemerintah, dan tujuan dalam menyampaikan informasi publik tersebut adalah untuk memajukan kinerja pemerintahan itu sendiri. Peran humas dalam lingkungan pemerintah mempunyai kedudukan yang sangat penting dan strategis (Pratami & Septiadi, 2021).

Berkaitan dengan mengamankan kebijakan pemerintah maka dapat di selesaikan dengan komunikasi yang baik. Presiden Joko Widodo mengklaim bahwa kurangnya komunikasi adalah penyebab kericuhan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau. Dia menegaskan bahwa jika warga yang berunjuk rasa menentang proyek Rempang *Eco City* di pulau itu dibicarakan dan diberi solusi, kericuhan itu tidak akan terjadi (Nugraheny & Rastika, 2023) selain dari pada itu untuk pengembangan Kawasan Rempang akan melibatkan masyarakat setempat. Sehingga, *Government public relations* mengajak agar masyarakat tidak terpengaruh dengan informasi negatif yang telah beredar dari mereka yang tidak bertanggung jawab. Ditambah lagi, bahwa saat ini Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 78 Tahun 2023, tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional. Dalam Perpres tersebut, telah diatur mengenai hak-hak yang diterima oleh warga yang terdampak atas Proyek Strategis Nasional (humasbpbatam, 2023). Penelitian lain juga menunjukkan bahwa untuk mengamankan kebijakan pemerintah konflik ini juga melibatkan relokasi warga yang menimbulkan penilakan dari sebagian warga dan akhirnya berujung pada bentrokan pada tanggal 7 september 2023. Konflik ini memiliki dampak ekonomi dan sosial yang signifikan, serta melibatkan isu-isu hak masyarakat hukum adat dan aspek sejarah serta budaya. Kasus pulau Rempang menjadi contoh kompleksitas permasalahan lahan dan hak asasi manusia yang memerlukan perhatian serius dan solusi holistik dari pemerintah dan pihak terkait (Widiyanti et al., 2023).

Memberikan Pelayanan, dan pesan atau informasi mengenai kebijakan dan hingga program-program kerja secara nasional kepada masyarakat

Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), sesuai visinya memberikan kontribusi bagi peningkatan investasi untuk mewujudkan visi presiden dan wakil presiden, Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. *Government Public Relations* merupakan PR non komersial yang dijalankan oleh lembaga pemerintahan yang menekankan pada pelayanan penduduk dalam bidang komunikasi yang bersifat responsif serta publisitas utamanya merupakan informasi-informasi publik (Alifha & Hapsari, 2021). Masyarakat Rempang yang berkonflik melakukan unjuk rasa atas ketidakmauan dan menolak akan kebijakan pemerintah

terhadap BP Batam sebenarnya sosialisasi Program Strategis Nasional yang teralisasi pada proyek *Eco City* sudah diberikan dan memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat. Mengutip dari liputan6.com yang diberikatan bahwa BP Batam sudah sosialiasi pada masyarakat Rempang terkait program yang akan direalisasikan. Sosialiasi disampaikan bertujuan untuk mengamankan kebijakan pemerintah dalam rangka menjalankan program kerjasama dengan pihak *Eco City*.

Gambar 2: BP Batam sudah sosialisasi kewarga Rempang



Sumber:liputan6.com

Pada data gambar 2, adalah kejadian masyarakat Rempang yang ricuh saat BP Batam melakukan pengukuran tanah, padahal jauh sebelum pengukuran dilaksanakan sudah diberikan sosialisasi. Terdapat peluang dan kendala untuk mewujudkan aparatur pelaksana *Government public relations* yang profesional tergantung pada visi, misi, strategi dan taktik pimpinan dalam memberdayakan peran, fungsi, serta kewenangan lembaga kehumasan dalam mengelola informasi publik (Nugraha et al., 2022). *Government public relations* harus adil, terbuka, rasional, dan tentu saja adil. Apabila humas pemerintah dan masyarakat berhubungan baik Pada akhirnya, ini akan membuat pemerintah terlihat baik di mata masyarakat Rempang, seperti yang diharapkan oleh tugas *government public relations*. Oleh karena itu, komunikasi yang terjadi antara masyarakat dan pemerintah tidak boleh diabaikan. Setiap program pemerintah harus melibatkan masyarakat agar kebijakan dan pelayanan publik, yang merupakan inti dari tugas pemerintah, dapat berjalan dengan baik. seperti yang dikemukakan(Ardianto, 2013) bahwa *government public relations* harus mampu menjalin relasi yang baik ke dalam(*internal*) maupun keluar(*eksternal*)instansi dengan tugas utamanya yakni melayani informasi kebijakan publik pelayanan. Diperkuat dari pernyataan tersbut(Sari, 2017) juga mengatakan *government public relatons* lebih menekankan pada pelayanan terhadap publik demi meningkatkan pelayana yang akan diberikan pada publik.

Menjadi komunikator dan sekaligus sebagai mediator yang proaktif dalam menjembati kepentingan instansi pemerintah di satu pihak, dan menampung aspirasi

Mengirimkan pesan kepada khalayak disebut komunikator. Komunikator biasanya disebut sebagai pengirim, sumber, sumber, atau *encoder* karena mereka adalah pelaku utama dalam proses komunikasi dan melakukan peran yang sangat penting, terutama

dalam mengendalikan jalannya komunikasi. Humas BP Batam menjadi komunikator untuk mengirimkan pesan menyampaikan pesan pada masyarakat rempang. Sedangkan mediator adalah orang yang bertindak sebagai penengah dalam proses mediasi dianggap sebagai pihak yang netral, artinya mereka tidak boleh cenderung kepada salah satu pihak. Dalam hal ini *government public relations* BP Batam menjadi komunikator dan mediator tanpa berpihak pada lembaganya atau berpihak pada masyarakat rempang. Hal ini dapat terlihat jelas bahwa fungsi *Government public relations* sebagai komunikator sekaligus menjadi mediator pada masyarakat Rempang yang terlibat konflik. Masyarakat yang melakukan demonstrasi menyampaikan aspirasinya. *Public relations* BP Batam menampung aspirasi itu, hal ini diperkuat dengan adanya wawancara sebagai berikut

"Itulah komitmen saya sebagai Kepala BP Batam. Kami tak akan memindahkan masyarakat tanpa persiapan yang maksimal. Saya juga sudah dipanggil oleh pemerintah pusat dan mendapat instruksi bahwa pengembangan ini akan berjalan. Perlu diketahui, bahwa luas Pulau Rempang yang dijadikan usaha itu seluas 7.572 hektare. Bukan seperti luasan yang tersebar di media sosial. Oleh sebab itu, saya mengajak masyarakat tidak termakan informasi yang tidak benar di luar sana,"(wawancara Rudi Muhammad,2023)

Pada kutipan wawancara diatas, bahwa *Government public relations* menyampaikan pada masyarakat Rempang untuk tidak mudah menerima informasi palsu yang belum pasti kebenarannya. Dasar pemikiran humas dalam pemerintahan berdasarkan dua fakta dasar. Pertama, masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui, karena itu, para pejabat pemerintah mempunyai tanggungjawab untuk memberi penjelasan kepada masyarakat. Kedua, ada kebutuhan bagi pejabat untuk menerima masukan dari masyarakat tentang persoalan baru dan tekanan sosial, untuk memperoleh partisipasi dan dukungan masyarakat (Maulida, 2020)

Gambar 3 : Kepala Bp Batam



Sumber: Humas@bpbatam.go.id

Data pada gambar 3 diatas, BP Batam menyampaikan pada masyarakat Rempang memberikan solusi terbaik, melalui aktivitas *government public relations* dalam melaksanakan pengelolaan informasi dan komunikasi secara kontiniu untuk memperoleh dukungan dan pemahaman dari publik dengan tujuan untuk membangun

reputasi instansi. Tugas *government public relations* yaitu melaksanakan; (1) Sosialisasi program pemerintah; (2) Edukasi atau literasi kepada masyarakat; (3) *Counter naracy*; dan (4) *Nation branding* (Riana & Chandra, 2017). Aktivitas kehumasan pemerintah dapat dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan peran untuk menjalin komunikasi atau hubungan yang baik dengan media massa untuk mensosialisasikan berbagai program-program pemerintah untuk kepentingan masyarakat (Aras, 2014). Sejalan hasil penelitian Nugroho & Sulistyoroni dalam komunikasi bencana tugas dan tanggung jawab *govement public relations* untuk memberikan penerangan, informasi, dan edukasi tentang pelayanan masyarakat (*public service*), mampu meyakinkan masyarakat untuk berpartisipasi melaksanakan program pembangunan dengan semangat kejujuran dan keterbukaan memebrrikan pelayan serta pengebadian (Kadarisman, 2021). Penelitian lain juga menyebutkan bahwa pelaksanaan fungsi pokok *government public relations* pada lembaga pemerintah dalam menjembatni kepentingan lembaga dan publiknya diwujudkan malui peran sebaai fasilitor komunikasi. *Government public relations* sebagai fasilitor komunikasi harus mengelola atau menciptakan komunikasi dua arah dan membuang gangguan-gangguan komunikasi serta membuka saluran-saluran komunikasi (Prastowo, 2020)

Berperan serta dalam menciptakan iklim yang kondusif dan dinamis demi mengamankan stabilitas dan keamanan politik pembangunan nasional, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Melihat apa yang terjadi pada masyarakat Rempang maka *Government public relations BP Batam* menghimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi dengan isu miring terkait pengukuran tanah di Rempang. Hal ini dilakukan agar terjaganya kondisi yang kondusif tidak berlarut larut dalam situasi yang buruk. Situasi kondusif di Rempang dapat terus terjaga, demi kelancaran investasi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada dasarnya *government public relations* memiliki peran seperti yang dikemukakan oleh (Ruslan, 2016) bahwa peran *government public relations* menyangkut beberapa hal yaitu: (1) secara taktis (pendek), informasi yang diberikan oleh *government public relations* diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dengan efektif; (2) secara strategis (jangka panjang), dalam proses pengambilan keputusan *government public relations* memiliki peran penting dan dapat berperan aktif (*decision making process*). Selain itu Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait, beliau menyatakan :

“Membuka ruang untuk berdialog langsung dengan masyarakat yang telah hadir. Dengan harapan, ada solusi terbaik untuk pengembangan ke depannya, untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait pengembangan Rempang Eco-City ke depan” (wawancara , Ariastuty Sirait, 2023)

Menilik apa yang disampaikan oleh Ibu Ariastuty Sirait, bahwa Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam melakukan pertemuan dengan masyarakat Rempang di Kantor Kecamatan Galang. Bertujuan untuk berdialog langsung dengan masyarakat Rempang. *Government Public Relations BP Batam* mengedepankan upaya-upaya yang humanis dan cara-cara yang baik. Selain itu penulis Mengutip dari antranews.com ,beliau menyatakan

“ Kerena kawasan tersebut masuk wilayah kerja BP Batam, sehingga HPL Pulau Rempang berada di Bp Batam. Jadi berdasarkan Keppres 28 Tahun 1992 sudah jelas

bahwa wilayahkerja BP Batam tidak hanya di batam saja,tapi sampai kewilayah Rempang dan Galang”(wawancara, Ariastuty Sirait, 2023)

Menilik kutipan diatas, bahwa ketentuan sudah ditapak oleh pemerintah sejak mengoptimalkan Batam menjadi kawasan industri dengan dibetuknya Otorita Batam berdasarkan keputusan Presiden (Keppres) Nomor 41 Tahun 1974 . Otorita Batam kemudian berubah menjadi BP Batam pada 2007. Berikut adalah data Gambar bahwa BP Batam menjelaskan Hak Pengelolaan Lahan kawasan Rempang (Pratama, 2023)

Gambar 4: Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait



Sumber: Antaranews.com

Data pada gambar 4 diatas, adalah salah satu kegiatan fungsi *govermnet public relations* dalam menciptakan iklim yang kondusif dan dinamis. Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait menjelaskan demi stabilitas dan kemandirian baik untuk jangka pendek dan jangka panjang, menyampaikan Hak Pengelolaan Lahan kawasan Rempang. Maka setelah pertemuan yang dilakukan membuat keadaan masyarakat Rempang mulai kondusif. Setelah pertemuan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, dengan orang-orang di Rempang, keadaan menjadi lebih baik. Selain itu, ada solusi dan jaminan bahwa rencana pembangunan Rempang *Eco City* tidak akan berdampak negatif pada masyarakat tempatan(Sara & Juanda, 2023) Selain itu, kembalinya warga ke aktivitas yang tenang, seperti melaut dan kembalinya mereka ke aktivitas ekonomi masyarakat lainnya, adalah tanda bahwa suasana menjadi kondusif. ini dapat dilihat seiring pemberitaan di media Indonesia seperti terdapat pada gambar 5 berikut.

Gambar 5 : Suasana Kondusif Mayarakat Rempang



Sumber: mediandonesia.com

Data pada gambar 5 diatas, merupakan acara masyarakat Rempang yang sudah mulai kondusif, sehingga tercapai iklim yang kondusif. Sementara sudah 342 yang sudah mendaftarkan siap untuk pindah dari 498 KK yang berkonsultasi dengan BP Batam. Jumlah tersebut sudah mencapai 30% dari jumlah penduduk di wilayah kelurahan Sembulang yang akan terdampak proyek Rempang *Eco City*. *Government public relations* meminta masyarakat rempang untuk tidak terprovokasi lagi dengan pihak yang tidak bertanggungjawab, pemberitaan dimedia dan oknum tertentu, karena ini sudah ditetapkan pemerintah dalam pembangunan nasional, jadi masyarakat Rempang bisa berhenti demonstrasi dan bersedia menerima apa yang sudah ditetapkan pemerintah.

Melihat apa yang terjadi pada konflik masyarakat Rempang maka *government public relations* BP Batam telah melaksanakan fungsinya serta berperan dan melakukan tugasnya terjun langsung menghadapi masyarakat Rempang. Hasil analisis penulis fungsi yang dilakukan oleh *Government public relations* BP Batam adalah Pertama, bahwa *Government public relations* dapat mengamankan kebijaksanaan Pemerintah, didasari pada Program Strategis Nasional pembangunan Rempang *Eco City* dari Xinyi Glass Holdings Ltd. Kedua, *Government public relations* BP Batam memberikan pelayanan, pada masyarakat rempang. Menyampaikan informasi tentang kebijaksanaan, pembangunan program strategis nasional dengan *Eco City* secara nasional kepada masyarakat. Ketiga, *Government public relations* menjadi komunikator dan sekaligus sebagai mediator yang proaktif dalam menjembatani kepentingan instansi pemerintah di satu pihak, dan menampung aspirasi. Faktanya masih 300 penduduk dari tiga kampung yang terkena dampak pembangunan Rempang *Eco City* setuju untuk pindah. Sebenarnya ini masalah komunikasi agar masyarakat di Sembulang Hulu, Sembulang Tanjung, dan Pasir Panjang bersedia mengikuti program Strategis Nasional maka komunikasi harus jelas. Seperti yang disampaikan oleh bapak Presiden Jokowi, menurut Kompas.Id beliau menyebut ada komunikasi yang kurang baik sehingga muncul permasalahan di Rempang. Menurut Presiden, keributan yang terjadi saat warga unjuk rasa memprotes proyek Rempang *Eco City* di kawasan pulau itu, semestinya tidak akan terjadi sekiranya warga diajak bicara dan diberikan solusi (Saptowalyono, 2023). Selain dari pada itu langkah lebih baiknya humas pemerintah bisa berinteraksi lebih inovatif, berpikir aktif, dan menyampaikan informasi berdasarkan data. Realitanya masih ada

hubungan masyarakat pemearintah yang memahami peran hubungan masyarakat pemerintah hanya sebagai peran pencitraan semata, yaitu bagaimana caranya membuat kesan positif kepada rakyat dengan menyampaikan informasi-infomasi yang cenderung satu sisi semata(Sani et al., 2020)

Strategi momunikasi sangat penting untuk bisa membantu program kehumasan di lembaga pemerintahan agar lebih efektif. Sebab strategi komunikasi akan dapat membantu secara lebih efektif dalam mengembangkan hubungan, meningkatkan reputasi dan membujuk orang untuk bertindak(Lee et al., 2012). Sejatinya *public relation* harus memiliki 4 peran dalam hal menghadapi situasi konflik yang terjadi pada masyarakat Rempang. Ruslan dalam(Rosmala, 2021) peran public relations yaitu Pertama, sebagai *expert priediber* adalah menjadi penasihat ahli untuk pimpinan atau perusahaan. Kedua, *public relations menjadi problem solving fasilitator* diartikan sebagai fasilitator proses pemecahan setiap masalah yang muncul diperusahaan. Ketiga, *communication technician* artinya menjadi teknisi komunikasi dan bisa memberikan solusi setiap permasalahan yang terjadi. Keempat, *communication fasilitator* artinya public relations sebagai fasilitator komunikasi atau yang menjembatani perusahaan dengan mitra,masyarakat, media dalam menyelesaikan konflik yang terjadi.

Keempat, *Government public relations* BP Batam sudah berperan dalam menciptakan iklim yang yang kondusif dan dinamis demi mengamankan stabilitas dan keamanan politik pembangunan nasional, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Faktanya Masyarakat rempang yang siap direlokasi diberikan lahan seluas 500 meter persegi per kepala keluarga yang telah disertifikatkan pemerintah dan rumah tipe 45. Realitanya iklim yang kondusif dan dinamis tidak dapat terwujud secara optimal karena dari 700 KK yang didata baru 493 KK yang menyetujui direlokasi. Menurut penulis, *Government public relations* harus membuat strategi komunikasi dalam mengatasi konflik Rempang sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Pratama & Hermawati, 2021) strategi komunikasi *public relations* dilakukan dengan : (1) Penetapan komunikator. Komunikator merupakan tokoh sentral dalam pemerintahan, merupakan orang yang tepat serta menguasai materi,serta memiliki kredibilitas,daya tarik,dan kekuatan (*power*); (2) target sasaran dalam penyampaian pesan; (3) Pesan yang disampaikan oleh *Public relations* bersifat informatif, persuasif, dan edukatif; (4) *Public relations* menyampaikan pesan pada strategi melalui operasi aman bersama media massa.

Pada fungsi *Government Public Relation* yang penulis analisa diatas maka jika dilihat dari fakta dan data yang ada fungsi goverment ke 4 perlu ditingkatkan dalam mengamankan stabilitas keamanan yang terjadi pada masyarakat Rempang. Dua hal utama membentuk dasar pemerintahan humas. Pertama, Pemerintah harus memberi tahu masyarakat karena mereka berhak atas informasi. Kedua, mereka harus menerima umpan balik dari masyarakat tentang masalah baru dan tekanan untuk mendapatkan dukungan dan partisipasi. Menurut Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik, *Government Public Relations* (GPR) adalah program utama untuk memastikan bahwa masyarakat mengetahui apa yang dilakukan pemerintah dan berpartisipasi dalam pembangunan. *Government public relation* sudah hakekatnya untuk menjalankan fungsi ini, maka sudah seharusnya lembaga Pemerintah bisa memberikan pelayanan prima pada masyarakat (Prastowo, 2020). P Menambahkan apa yang dikemukakan oleh I gusti Ngurah Putra dalam (Suprawoto, 2018) fungsi *goverment public relations* sebenarnya jika dipandnag secara khusus ada dua yaitu: (1)

Information release, artinya *government public relations* harus selalu mengkomunikasikan setiap langkah, tindakan, program, dan kebijakan kepada semua lapisan masyarakat agar dipahami; (2) *Information seeking*, artinya *government public relations* juga sebagai mata dan telinga lembaga. Oleh sebab itu *government public relations* harus dapat mendengar aspirasi masyarakat sebagai masukan pertimbangan dalam membuat kebijakan. Untuk itu *Government pr Bp Batam* dapat menerapkan *information seeking* dan memberikan *information release* pada masyarakat Rempang saat memberikan solusi konflik yang terjadi. Dalam hasil penelitian (Sani et al., 2020) bahwa Humas Pemerintah berperan dalam hal sebagai berikut berikut: (1) Menciptakan *goodwill*; (2) Menjaga hubungan baik dengan stakeholder; (3) Membangun pemahaman masyarakat tentang kebijakan Pemerintah; dan (4) Membangun kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap sebuah pemerintahan. *Government Public Relations* dalam melakukan perannya sebagai komunikator humas pemerintah harus melakukan komunikasi interaktif dengan media massa dan pers. Salah satu media massa humas pemerintah dapat menyampaikan informasi tentang kota secara lebih konferenshif (Wahyudin & Erlandia, 2018). Selain dari pada itu *Government Public Relation* memiliki fungsi mendukung masyarakat untuk meningkatkan citra dan reputasi sebuah instransi pemerintahan, membangun jembatan sosialisasi yang baik membangun hubungan yang menguntungkan antar stakeholder serta membangun kepercayaan. Hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dari pemerintah terkait dengan kemampuan badan-badan publik untuk mengalokasikan sumber daya yang mereka miliki untuk membangun birokrasi yang efisien dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dikemukakan, maka sebagai kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa *Government public relations BP Batam* setelah dianalisa sudah menjalankan fungsinya dengan melakukan 4 hal yaitu: (1) *Government public relations BP Batam* dinilai berhasil mengamankan kebijaksanaan pemerintah dengan terealisasinya Program Strategis Nasional pada Proyek *Eco City* dari Xinyi Glass Holdings Ltd. Cara mewujudkannya dengan terealisasinya pengamanan kebijakan pemerintah yang dilakukan oleh BP Batam dengan memberikan sosialisasi beberapa kali pada masyarakat Rempang bahwa Pemerintah menjanjikan hak atas lahan, rumah, uang tunggu untuk hidup dan uang sewa tempat tinggal tiap keluarga. (2) Bahwa *government public relations BP Batam* memberikan pelayanan, dan pesan atau informasi mengenai kebijaksanaan dan hingga program-program kerja secara nasional kepada masyarakat pada saat situasi konflik. Pelayanan diberikan dengan menyampaikan informasi secara berkala pada masyarakat Rempang di (3) Menjadi komunikator dan sekaligus sebagai mediator yang proaktif dalam menjembatani kepentingan instansi pemerintah di satu pihak, dan menampung aspirasi, serta memperhatikan keinginan-keinginan publiknya di lain pihak. Aspirasi ditampung oleh BP Batam dan memberikan konsultasi pada masyarakat Rempang (4) *Government Public Relation BP Batam* sudah berperan serta dalam menciptakan iklim yang kondusif dan dinamis demi mengamankan konflik yang terjadi di Rempang. Stabilitas dan keamanan politik pembangunan nasional, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kondusifnya masyarakat Rempang dibuktikan dari warga yang ikut program relokasi terus bertambah. Data yang diperoleh oleh *Government Bp Batam* bahwa masyarakat Remapnag sudah mendaftar siap untuk pindah yaitu berjumlah 498 KK yang

berkonsultasi dengan BP Batam. Jumlah tersebut sudah mencapai 30% dari jumlah penduduk di wilayah kelurahan Sembulang yang akan terdampak proyek Rempang *Eco City*

Penelitian ini dapat membantu memahami bagaimana fungsi government public relations BP Batam dalam menjalankan aktivitasnya dan mengatasi konflik masyarakat Rempang untuk tidak buta akan informasi dan kebijakan pemerintah dalam program Pembangunan Nasional. Penulis menyarankan dalam penelitian ini *Government public relations* BP Batam dalam menghadapi kasus konflik masyarakat rempang dapat mengedepankan mekanisme keadilan restoratif dan proses yang dialogis. Berkomitmen melakukan evaluasi internal untuk terus memperbaiki prosedur penanganan sengketa di dalam masyarakat Rempang. Pelaksanaan kegiatan dituangkan dalam kebijakan yang transparan dan dikonsultasikan dengan masyarakat Rempang. Sebagai praktisi Government Public Relations yang ada di BP Batam maka perlu mengembangkan sebuah paradigma baru yaitu dari konsep relasi ke kolaborasi serta mengoptimalkan isi pesan pesan Pemerintah terkait dengan Program Pembangunan Strategis Nasional dan kebijakan pembangunan yang ingin disampaikan kepada publik.

Referensi

- Alifha, F., & Hapsari, D. R. (2021). Effectiveness of Cyber Government Public Relations in Dissemination of Health Information as a Form of Crisis Communication (Case: Covid-19 Health Information Bogor Regency Community). *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat*, 05(06), 837–842. file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/922-Article Text-2438-1-10-20220120.pdf
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak Publisher.
- Anggrahini, M. D., Rochayanti, C., & Sosiawan, E. A. (2008). PENGELOLAAN ISI INFORMASI WEBSITE PEMDA SEBAGAI. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6, 145–152.
- Aras, M. (2014). *KEGIATAN GOVERNMENT PUBLIC RELATION DALAM MEMBANGUN KOMUNIKASI DENGAN DUNIA PERS : STUDI KASUS HUMAS PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR*. 5(2), 1056–1065.
- Ardianto, E. (2013). *Handbook Of Public Relations: Pengantar Komprehensif*. Simbiosis Rekatama Media.
- Arofi, A. M. (2018). *Strategi Government Public Relations Kementerian Komunikasi Dan Informatika Dalam Mengelola Isu Publik*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Astuty, S., Setyastuti, Y., Maulina, N., & Hanief, L. (2017). ANALISIS FUNGSI DAN PERAN HUMAS DALAM UPAYA IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE (Studi pada Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin) Sri. *Journal Of Communication Studies*, 2(1).
- Bakti, I., & Zubair, F. (2021). *Fungsi peran dan teknik komunikasi humas dalam program Sabilulungan Bersih Kabupaten Bandung*. 6(1), 45–66.
- Budhirianto, S., & Sunarsi, R. (2017). INFORMASI DIBIRO HUMAS PEMPROV JABAR REVITALIZATION OF FUNCTIONS GOVERNMENT PUBLIC RELATION IN GOVERNANCE INFORMATION ON BUREAU OF PUBLIC RELATION AT. *Jurnal KOMunikasi Media Dan Informatika*, 6.
- Deny, S. (2023). *Menteri Bahlil Soal Konflik Rempang: Yang Diberitakan Terlalu Lebay*. Liputan6.Com. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5428587/menteri-bahlil-soal-konflik-rempang-yang-diberitakan-terlalu-lebay>
- Devi, B., Siswanto, L., & Abraham, F. Z. (2016). *PERAN HUMAS PEMERINTAH SEBAGAI*

- FASILITATOR KOMUNIKASI PADA BIRO HUMAS PEMPROV KALIMANTAN SELATAN THE ROLE OF GOVERNMENT PUBLIC RELATIONS AS FACILITATORS COMMUNICATION IN BUREAU OF PUBLIC RELATION AT SOUTH KALIMANTAN PROVINCE.* 19(1), 55–68. <https://doi.org/10.20422/jpk.v19i1.64>
- Fadli, M. R. (2021). *Memahami desain metode penelitian kualitatif.* 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.
- Fahri, M. E., & Unde, A. A. (2018). *Analysis of Government Public Relations Role and Function in Global Information Era at Legislative House Central Sulawesi Province.* 7(2).
- Furqon, D., Patrianti, T., Syahputra, Y. R., Rifqi, M., Universitas, F., & Jakarta, M. (2024). *Peran Humas Pemerintah Kota Batam Dalam Penanganan Kasus Rempang. INNOVATIVE: Journal Of Social Sciense Research, 4,* 5254–5264.
- humasbpbatam. (2023). *Bersama Forkopimda, BP Batam Akan Terus Menjaga Situasi Kondusif di Rempang.* BadanPengusahaanBatam. <https://bpbatam.go.id/bersama-forkopimda-bp-batam-akan-terus-menjaga-situasi-kondusif-di-rempang/>
- Kadarisman, A. (2021). *Government public relations dalam pengembangan pariwisata masa pandemi COVID-19 di Geopark Ciletuh. PProfesi Humas Jurnal Ilmiah Ilmu Hubungan Masyarakat, 5(2),* 270–290.
- Kominfo. (2023). *Lingkup Program Government Public Relations.* Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia. https://www.kominfo.go.id/content/detail/6857/lingkup-program-government-public-relations/0/pp_gpr
- Kriyantono, R. (2017). *Teori-Teori Public Relations Perspektif Barat & Lokal: Aplikasi Penelitian dan Praktik.* Kencana.
- Lee, M., Neeley, G. W., & Stewart, K. (2012). *The Practice of Government Public Relations Chapter 1 Introduction.* University of Dayton eCommons. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=tAwxEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT10&dq=Martinelli,+D.+K.+\(2012\).+The+Practice+of+Government+Public+Relations.+In+M.+Lee,+G.+Neeley,+%26+K.+Stewart+\(Eds.\),+The+Practice+of+Government+Public+Relations+\(pp.+143-\).+Taylor+%26+Francis.&ots=aDhHiHQ1L_&sig=medYFnPIDGludeak8WrqVEUm2k8&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=tAwxEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT10&dq=Martinelli,+D.+K.+(2012).+The+Practice+of+Government+Public+Relations.+In+M.+Lee,+G.+Neeley,+%26+K.+Stewart+(Eds.),+The+Practice+of+Government+Public+Relations+(pp.+143-).+Taylor+%26+Francis.&ots=aDhHiHQ1L_&sig=medYFnPIDGludeak8WrqVEUm2k8&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)
- Lubis, E. E. (2012). *PERAN HUMAS DALAM MEMBENTUK CITRA PEMERINTAH. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 12(1),* 1–73.
- Maulana, F. (2023). *Konflik Rempang: Benarkah Mereka Warga Liar?* Universitas Muhammadiyah Jakarta. <https://umj.ac.id/opini-1/konflik-rempang-benarkah-mereka-warga-liar/>
- Maulana, P. S., & Afifi, S. (2021). *Analisis Peran dan Fungsi Public Relations di Lembaga Pendidikan Islam Analysis of the Role and Function of Public Relations at Islamic Education Institutions merupakan tempat berlangsungnya mengubah tingkah laku individu ke belajar mengajar , secara umum. Jurnal Mahasiswi Cantrik, 1(2),* 147–162.
- Maulida, R. (2020). *PERAN HUMAS PEMERINTAH SEBAGAI SARANA KOMUNIKASI PUBLIK (STUDI PADA BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL PEMERINTAH KOTA BOGOR). UG Jurnal, 14(7),* 9–17.
- Miles, B. M., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis (3rd ed.; H. Salmon, Ed.).* Arizona State University, USA.

- Moleong, J. L. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rosda Karya.
- Nugraha, A. R., Sjoraida, D. F., & Novianti, E. (2022). *Analisis strategi humas pemerintahan era milenial dalam menghadapi tata kelola informasi publik*. 6(2), 286–310.
- Nugraheny, D. E., & Rastika, I. (2023). *Soal Ricuh di Pulau Rempang, Jokowi: Bentuk Komunikasi yang Kurang Baik*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2023/09/12/12434781/soal-ricuh-di-pulau-rempang-jokowi-bentuk-komunikasi-yang-kurang-baik>
- Prastowo, F. A. A. (2020). Pelaksanaan fungsi pokok humas pemerintah pada lembaga pemerintah. *PROfesi Humas*, 5(1), 17–37.
- Pratama, I. Y. (2023). *BP Batam jelaskan soal Hak Pengelolaan Lahan kawasan Rempang*. Antaraneews.Com. <https://www.antaraneews.com/berita/3758187/bp-batam-jelaskan-soal-hak-pengelolaan-lahan-kawasan-rempang>
- Pratama, I. Y., & Hermawati, T. (2021). Strategi komunikasi humas pemerintah kota tangerang. *Komunikasi Massa*.
- Pratami, N., & Septiadi, M. A. (2021). *Sosialisasi Penerapan Fungsi Humas Desa Sebagai Pengelola Informasi pada Pemerintah Desa Batu Itam*. 38(November).
- Rachman, A. (2023). *7 Fakta Soal Kisruh di Pulau Rempang, Seret Nama Tomy Winata*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230918111142-4-473321/7-fakta-soal-kisruh-di-pulau-rempang-seret-nama-tomy-winata>
- Riana, Y., & Chandra, R. (2017). *Implementasi Sinergi Humas Pemerintah Indonesia Pascapenetapan INPRES No.9 Tahun 2015*. 01(01), 566–573.
- Rosmala, R. (2021). Fungsi komunikasi korporat Humas PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru. *PROfesi Humas Jurnal Ilmiah Ilmu Hubungan Masyarakat*, 5(2), 143. <https://doi.org/10.24198/prh.v5i2.28329>
- Ruslan, R. (2016). *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi*. Raja Grafindo Persada.
- Sani, A., Hidayat, M., & Sjafirah, N. A. (2020). *Pemahaman petugas kehumasan Kementerian Dalam Negeri tentang peran Humas Pemerintah*. 4(2), 215–236.
- Saptowalyono, C. A. (2023). *Presiden Jokowi: Masalah di Rempang Imbas Komunikasi yang Kurang Baik*. Kompas.Id. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/09/12/presiden-jokowi-sebut-permasalahan-di-rempang-imbaskan-komunikasi-yang-kurang-baik>
- Sara, E., & Juanda, F. (2023). *Situasi Rempang Makin Kondusif, Warga: Alhamdulillah, Sudah Sedikit Tenang*. Batampos. <https://batampos.jawapos.com/infokota/20/09/2023/situasi-rempang-makin-kondusif-warga-alhamdulillah-sudah-sedikit-tenang/>
- Sari, A. A. (2017). *Dasar Dasar Public Relations*. Deepublish.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suprawoto. (2018). *Government Public Relations: Perkembangan dan Praktik di Indonesia*. Prana Media Group.
- Wahyudin, U., & Erlandia, D. R. (2018). *PERAN HUMAS PEMERINTAH DALAM PEMASARAN CITY BRANDING*. 2, 162–167.
- Widiargun, D., Wulandari, E., Diah, I., Islam, U., & Yusuf, S. (2023). *PERAN PUBLIK RELATIONS DALAM ISU DAN KRISIS PT. PERTAMINA (PERSERO)*. 3(2), 49–58.
- Widiyanti, P., Rosida, L., Rifai, M., Saputra, K. A., & Maskur, A. (2023). Analisis Regulasi Hukum Dan Implikasi Terhadap Penegakan HAM Di Pulau Rempang. *Visi Sosial Humaniora(VSH)*, 2023(1), 29–37.

